

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu bentuk dari pengembangan potensi diri dalam rangka memiliki wawasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 20 tahun 2003). Pendidikan juga merupakan salah satu penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Melalui Pendidikan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menghadapi era kehidupan global yang penuh dengan persaingan. Tokoh Pendiri nasional Ir. Soekarno dan Ki Hajar dewantara menyebutkan bahwa satu-satunya yang dapat mengubah nasib suatu bangsa hanyalah pendidikan karena dengan pendidikan dapat menjadikan investasi jangka panjang bagi masa depan suatu bangsa (www.bpplsp-reg-1.go.id).

Dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu poin yang menjadikan perhatian khusus adalah tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, hal

ini kemudian diterangkan dalam batang tubuh yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi kemanusiaan. Serta UUD 1945 yang telah diamademen menyatakan dalam pasal 31 ayat (2) yang bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya”. Amanat Pembukaan UUD Negara RI 1945 menghendaki agar warga negara Indonesia menjadi cerdas dan dapat bersaing di era globalisasi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menyeluruh bagi semua warga masyarakat Indonesia baik masyarakat kaya maupun masyarakat miskin.

Indonesia telah memiliki program untuk meningkatkan Mutu Pendidikan agar tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Program ini adalah salah satu kebijakan yang mempresentasikan dukungan pemerintah terhadap pendidikan. Wajib belajar secara langsung atau tidak langsung akan berdampak kepada investasi yang harus dikeluarkan pemerintah dalam bidang pendidikan. Wajib belajar yang diselenggarakan tanpa diskriminasi, semua warga negara bisa mengakses pendidikan dasar. Wajib belajar, tidak hanya menyangkut akses terhadap pendidikan dasar, tetapi pemerintah harus menjamin pendidikan yang disediakan adalah pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas harus integral dengan wajib belajar untuk menghasilkan outcome yang bermutu dan berkualitas pula. Namun wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dirasa tidak akan berdampak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan adanya kendala dalam bidang biaya

yang dirasa oleh sebagian masyarakat miskin yang sangat tinggi. Padahal pendidikan adalah hak untuk seluruh warga masyarakat baik dari kalangan miskin sampai kalangan kaya.

Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya dengan memberikan kebijakan agar angka usia sekolah yang belum sekolah menurun. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Tujuan program dana BOS menurut Petunjuk Teknis Penggunaan (PTP) tahun 2012 adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program dana BOS bertujuan untuk :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf Internasional (SBI);
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Melihat dari tujuan program dana BOS diatas, pemerintah berharap untuk menekan pungutan atau iuran sekolah yang dibebankan kepada siswa agar dapat meningkatkan partisipasi pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dana BOS secara tidak langsung telah memberikan angin segar kepada masyarakat kurang mampu untuk berharap dapat memperoleh pendidikan yang layak dengan biaya pendidikan yang semakin murah ataupun bahkan gratis. Namun dalam

kenyataannya, masih sering dijumpai sekolah yang masih memberikan pungutan kepada siswanya walaupun hanya dalam jumlah yang tidak terlalu besar.

Hal ini dikarenakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang masih jauh daripada dana BOS yang telah dicairkan dan diterima oleh sekolah. Pemerintah dalam hal ini tidak dapat berbuat banyak karena pemerintah juga menyadari bahwa alokasi dana BOS yang diberikan kepada sekolah dirasa tidak dapat memenuhi semua anggaran belanja yang dimiliki sekolah, tetapi pemerintah juga tidak membenarkan semua pungutan atau sumbangan yang dilakukan oleh sekolah tanpa ada pertanggungjawaban.

Kota Malang adalah salah satu kota yang terkenal dengan kota pendidikan dan Kota Malang juga menempatkan sektor pendidikan ke dalam tiga besar penerima anggaran pembangunan. Selain itu, Kota Malang juga mendukung penuh program pemerintah dalam pendidikan yaitu Program dana BOS dengan menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah. Kota Malang menyelenggarakan program dan BOS sejak program ini direncanakan oleh pemerintah yaitu tahun 2005. Program dana BOS sangatlah berbeda dengan program pendidikan lain yang diberikan oleh pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus diimbangi dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan dan menurunnya angka putus sekolah di Kota Malang. Meskipun dalam implementasinya masih ada sekolah yang salah menggunakan dana BOS. Seperti halnya yang terjadi disalah satu SDN Kota Malang yang ditengarai ada kesalahan pelaporan penggunaan dana BOS. Di sekolah tersebut dana BOS dialokasikan

untuk uang transportasi pengawas ujian serta penguji. Padahal, dalam aturannya tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah untuk honor pengawas. Sementara Kabid Dikdas Kota Malang Mulyono berjanji akan melototi laporan penggunaan dana BOS yang telah masuk ke Diknas. Mulyono mengatakan, memang kasus kesalahan dalam pembuatan laporan dana BOS itu kerap terjadi. Dia menduga kepala sekolah bingung karena memang banyak tugas, selain mengajar juga harus menjadi administrator. (<http://www.malangraya.web.id>).

Maka sangat diperlukannya evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Menurut Dunn dan Ripley dalam Wibawa (1994:10) evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi sebagai: Eksplanasi, Kepatuhan, Auditing, dan Akunting. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak lain adalah sebagai monitoring dari kebijakan. Tujuan dari evaluasi terhadap kebijakan adalah untuk membuat kebijakan tersebut agar lebih tepat guna dalam pelaksanaannya.

Untuk lebih mengetahui tentang keefektifannya dalam membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan dana BOS di SDN Percobaan 1 Kota Malang, mengingat SDN Percobaan 1 Kota Malang ini termasuk sekolah di Kota Malang yang dapat dikatakan sebagai sekolah maju dengan berbagai prestasi yang diraih serta kondisi sekolah yang baik, serta ditambah dengan dukungan dari orangtua siswa yang dapat dikatakan memiliki kondisi ekonomi kelas menengah. Hal ini yang menjadi alasan bagi peneliti untuk mengevaluasi kebijakan dana BOS yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai data yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Percobaan 1 Kota Malang?
2. Bagaimanakah *output* dan *outcome* dari kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Percobaan 1 Kota Malang?
3. Bagaimanakah faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Meningkatkan Mutu pendidikan di SDN Percobaan 1 Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi di SDN Percobaan 1 Kota Malang
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi meliputi *output* dan *outcome* dari kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Percobaan 1 Kota Malang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dirasakan oleh pihak Sekolah selaku penerima dana bantuan

D. Kontribusi penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik dari segi akademis maupun segi praktis, antara lain :

1. Segi Akademis

- a. Sebagai bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya, dan ilmu pengetahuan lainnya
- b. Sebagai salah satu bahan dalam studi kebijakan publik terutama tentang kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan
- c. Sebagai bahan referensi dan pengetahuan peneliti dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada

2. Segi Praktis

Sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran/masukan bagi sekolah-sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pihak-pihak yang terkait agar kedepan dapat membantu melakukan perbaikan.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini mempunyai sistematika pembahasan, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penulisan dan menjadi acuan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kontribusi penelitian yang diberikan, dan sistematika penelitian yang berisi alur peneliti.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis yang relevan dan berhubungan dengan tema yang diangkat penulis agar nantinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian dan penganalisaan data

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, yaitu meliputi : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi dan situs penelitian beserta data-data yang dapat dihimpun dari permasalahan yang dikaji sejak awal yang tercantum dalam fokus penelitian, kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis lebih lanjut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan diuraikan mengenai hal penting secara garis besar dan umum. Sedangkan dalam saran berisikan tentang

masuk yang diajarkan untuk memperbaiki kebijakan di bidang pendidikan di masa mendatang.